



**PENILAIAN  
PELAKSANAAN TATA  
KELOLA BPR**

**PERIODE: Desember - 2025**

**PT. BPR DANA MULTI GUNA  
Jl. KH Dewantara No. 63  
Cikarang Utara**

## LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR. DANA MULTI GUNA

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:

Nama BPR : PT. BPR. DANA MULTI GUNA  
Alamat : Jl KH Dewantara No 63, Cikarang, Kab. Bekasi  
Sandi BPR : 600036  
Periode Laporan : Semester 2 tahun 2025

Kabupaten Bekasi, 26 Januari 2026

**Muhammad Alwin**  
Direktur Utama

**Riwandari Juniasti**  
Komisaris Utama

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Dana Multi Guna  
 Posisi : Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1
Peringkat Komposit	Peringkat 1												

### KESIMPULAN AKHIR

1. Pengurus PT.BPR Dana Multi Guna telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh pengurus BPR Dana Multi Guna.
2. PT. BPR Dana Multi Guna telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, pengurus tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

### FAKTOR POSITIF

1. Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
2. Hasil Rapat dan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan telah terdokumentasi dengan baik dan telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
3. Tidak terjadi benturan kepentingan di BPR yang dapat mengakibatkan kerugian.
4. BPR telah membuat rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. BPR sudah memiliki kebijakan dan pedoman manajemen risiko, dalam menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Dan telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Tidak ada pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK, sesuai ketentuan OJK.
7. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.

### FAKTOR NEGATIF

Tidak ada

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Dana Multi Guna  
 Posisi : Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1
Peringkat Komposit	Peringkat 1												

KESIMPULAN AKHIR
<p>1. Pengurus PT. BPR Dana Multi Guna telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh pengurus BPR Dana Multi Guna.</p> <p>2. PT. BPR Dana Multi Guna telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, pengurus tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.</p>
FAKTOR POSITIF
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>2. Hasil Rapat dan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan telah terdokumentasi dengan baik dan telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</li> <li>3. Tidak terjadi benturan kepentingan di BPR yang dapat mengakibatkan kerugian.</li> <li>4. BPR telah membuat rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>5. BPR sudah memiliki kebijakan dan pedoman manajemen risiko, dalam menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Dan telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>6. Tidak ada pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK, sesuai ketentuan OJK.</li> <li>7. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.</li> </ol>
FAKTOR NEGATIF
Tidak ada

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA**

**PT. BPR DANA MULTI GUNA  
TAHUN 2025**



**Jl. Ki Hajar Dewantara No. 63, Cikarang Utara, Bekasi 17530  
TELEPON: 021 - 890-1415, 890-2691**

## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	<b>BPR Dana Multi Guna</b>
Alamat	<b>Jln. K.H. Dewantara No. 63 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, 17530</b>
Nomor Telepon	<b>021 - 890-1415</b>

### Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Dana Multi Guna memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Dana Multi Guna dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kabupaten Bekasi. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Dana Multi Guna didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Dana Multi Guna .

BPR Dana Multi Guna telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Dana Multi Guna selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur - Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR Dana Multi Guna terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

### Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<b>1. Sangat Baik</b>
--	-----------------------

### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

1. Pengurus PT. BPR Dana Multi Guna telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan

- tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh pengurus BPR Dana Multi Guna.
2. PT. BPR Dana Multi Guna telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, pengurus tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

<b>1.</b>	Nama	<b>Muhamad Alwin</b>
	Jabatan	<b>Direktur Utama</b>
<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>		
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan</li> <li>2. Wajib mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab dalam Anggaran Dasar dan perundangan.</li> <li>3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>4. . Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>5. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, dengan : Pemisahan tugas tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, dan Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan independen terhadap unit kerja lain.</li> <li>6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundangan.</li> <li>7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.</li> <li>8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</li> <li>9. Mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.</li> <li>10. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.</li> <li>11. Menyusun Rencana Bisnis BPR, dan Rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha BPR dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, RUPS dan disampaikan ke OJK.</li> <li>12. Memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur layanan pengaduan.</li> <li>13. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi keuangan dan Inklusi Keuangan.</li> </ol>		
<b>2.</b>	Nama	<b>Darheni Cahya Noviyanti</b>

Jabatan

**Direktur dan/atau Yang Membawahkan  
Fungsi Kepatuhan****Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan.
2. Wajib mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan perundangan.
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR.
4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.
5. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai, dengan : pemisahan tugas tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, dan Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan independen unit kerja lain.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundangan.
7. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
10. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
11. Menyusun Rencana Bisnis BPR, dan Rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha BPR dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, RUPS dan disampaikan ke OJK.
12. Memastikan penyusunan dan pelaksanaan prosedur layanan pengaduan.
13. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi keuangan dan Inklusi Keuangan.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:**

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai

yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Dana Multi Guna.

d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.

e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti

f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	<b>Riwandari Juniasti</b>
	Jabatan	<b>Komisaris Utama</b>

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan tugas tanggungjawab secara independen, sehingga keputusan diambil obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dalam tiap kegiatan usaha organisasi.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
5. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional, kecuali : penyediaan dana ke pihak terkait sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPK, hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
6. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Internal, Eksternal, hasil pengawasan DeKom dan OJK.
7. Memberitahukan ke OJK selambatnya 10 hari kerja sejak ditemukan : Pelanggaran perundangan dan Keadaan membahayakan kelangsungan usaha. Hal yang wajib dilaporkan yaitu temuan yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
8. DeKom dapat meminta Direksi memberi penjelasan permasalahan kinerja dan kebijakan operasional. Permintaan penjelasan tsb dapat dilakukan dalam rapat DeKom. dengan Direksi dan keputusan rapat dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
9. Anggota DeKom, baik bersama maupun sendiri, pada jam kerja berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan oleh BPR dan berhak memeriksa pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainnya serta mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi.
10. DeKom berhak mengusulkan penggantian atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.
11. Membuat risalah Rapat DeKom dalam setiap Rapat.
12. Memberikan laporan pengawasan yang telah dilakukan dalam laporan pengawasan

Rencana Bisnis BPR tiap semester.

<b>2.</b>	Nama	<b>Bambang Widiyanto</b>
	Jabatan	<b>Komisaris</b>

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris, melaksanakan tugas tanggungjawab secara independen, sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada tiap kegiatan usaha organisasi.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
5. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional, kecuali: penyediaan dana ke pihak terkait sesuai ketentuan yang mengatur mengenai BMPK, dan hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
6. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Internal, Eksternal, hasil pengawasan DeKom dan OJK.
7. Memberitahukan ke OJK selambatnya 10 hari kerja sejak ditemukan : Pelanggaran perundangan dan Keadaan membahayakan kelangsungan usaha. Hal yang wajib dilaporkan yaitu temuan yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK.
8. DeKom dapat meminta Direksi memberi penjelasan permasalahan kinerja dan kebijakan operasional. Permintaan penjelasan tsb dapat dilakukan dalam rapat DeKom. dengan Direksi dan keputusan rapat dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
9. Anggota DeKom, baik bersama maupun sendiri, pada jam kerja berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan oleh BPR dan berhak memeriksa pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lainnya serta mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi.
10. DeKom berhak mengusulkan penggantian atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.
11. Membuat risalah Rapat DeKom dalam setiap Rapat.
12. Memberikan laporan pengawasan yang telah dilakukan dalam laporan pengawasan RBB tiap semester.

**Rekomendasi Kepada Direksi:**

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring

dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Dana Multi Guna.

d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.

e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti.

f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.

#### **4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

##### **Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:**

Nihil

#### **5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

##### **Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:**

Nihil.

#### **6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR**

##### **Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

<b>1.</b>	Nama	<b>Darheni Cahya Noviyanti</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>20,00</b>

##### **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

<b>1.</b>	Nama	<b>Riwandari Juniasti</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>67,50</b>

#### **7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR**

##### **Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR**

##### **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR**

<b>1.</b>	Nama	<b>Riwandari Juniasti</b>
	Nama Kelompok Usaha BPR	<b>PT BPR Dana Multi Guna</b>

	Persentase Kepemilikan (%)	<b>67,50</b>
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	<b>67,50</b>
<b>2.</b>	Nama	<b>Darheni Cahya Noviyanti</b>
	Nama Kelompok Usaha BPR	<b>PT BPR Dana Multi Guna</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>20,00</b>
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	<b>20,00</b>

### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

<b>1.</b>	Nama	<b>Drs. H, Soenarko</b>
	Nama Kelompok Usaha BPR	<b>PT BPR Dana Multi Guna</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>12,50</b>
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	<b>12,50</b>

### 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

#### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

<b>1.</b>	Nama	<b>Muhamad Alwin</b>
	Nama Bank/Perusahaan Lain	<b>Tidak Ada Kepemilikan Saham</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	Nama	<b>Darheni Cahya Noviyanti</b>
	Nama Bank/Perusahaan Lain	<b>Tidak Ada Kepemilikan Saham</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>

#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

<b>1.</b>	Nama	<b>Riwandari Juniasti</b>
	Nama Bank/Perusahaan Lain	<b>Tidak Ada Kepemilikan Saham</b>
	Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	Nama	<b>Bambang Widiyanto</b>
	Nama Bank/Perusahaan Lain	<b>Tidak Ada Kepemilikan Saham</b>

Persentase Kepemilikan (%)	<b>0,00</b>
----------------------------	-------------

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Bank lain dan perusahaan lain.  
 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain tidak ada.

### 9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

#### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

#### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

<b>1.</b>	Nama	<b>Drs. H. Soenarko</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Tidak Ada</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Tidak Ada</b>
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	<b>Tidak Ada</b>

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.  
 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada.

### 10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

#### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

#### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

<b>1.</b>	Nama	<b>Riwandari Juniasti</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Darheni Cahya Noviyanti - Saudara Sepupu (Tidak Semenda)</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Tidak Ada</b>
	Hubungan Keluarga Dengan	<b>Darheni Cahya Noviyanti - Saudara Sepupu</b>

	Pemegang Saham Lain di BPR	<b>(Tidak Semenda), Drs.H. Soenarko - Paman (Tidak Semenda)</b>
<b>2.</b>	Nama	<b>Darheni Cahya Noviyanti</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Tidak Ada</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Riwandari Juniasti - Saudara Sepupu (Tidak Semenda)</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	<b>Riwandari Juniasti - Saudara Sepupu (Tidak Semenda), Drs.H. Soenarko - Paman (Tidak Semenda),</b>
<b>3.</b>	Nama	<b>Drs.H. Soenarko</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	<b>Darheni Cahya Noviyanti - Keponakan (Tidak Semenda)</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	<b>Riwandari Juniasti - Keponakan (Tidak Semenda)</b>
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	<b>Riwandari Juniasti - Keponakan (Tidak Semenda), Darheni Cahya Noviyanti - Keponakan (Tidak Semenda)</b>

## **11. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris**

### **1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Gaji	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	<b>Rp277.000.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	<b>Rp403.000.000</b>

### **1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	<b>Rp348.000.000</b>

Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

**2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

**2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

**2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>



	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja BPR dan Pencapaian RBB Bulan Desember 2024 dan 31 Januari 2025</li> <li>2. Evaluasi Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko</li> <li>3. Dampak CKPN ( berdasarkan peergroup data) terhadap Aspek Permodalan</li> <li>4. Isu Strategis : Dampak perhitungan CKPN menggunakan Peergroup data dan CKPN Metode Migration</li> </ol>	
<b>2.</b>	Tanggal Rapat	<b>16 Mei 2025</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja BPR dan Pencapaian RBB Bulan Januari 2025 sd. 30 April 2025</li> <li>2. Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APUPPT PPSPM</li> <li>3. Isu Strategis               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertumbuhan KYD dan NPL</li> <li>b. TKS Berbasis Risiko</li> </ol> </li> <li>4. Lain-lain : Evaluasi KAP-AP Nano Suyatna.</li> </ol>	
<b>3.</b>	Tanggal Rapat	<b>24 Juli 2025</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja BPR dan Pencapaian RBB Bulan Januari 2025 sd. 31 Juni 2025</li> <li>2. Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APUPPT PPSPM</li> <li>3. Isu Strategis               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertumbuhan KYD dan NPL</li> <li>b. TKS Berbasis Risiko</li> </ol> </li> </ol>	
<b>4.</b>	Tanggal Rapat	<b>18 September 2025</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja BPR Dana Multi Guna Bulan Januari s/d 31 Agustus 2025</li> <li>2. Penunjukan AP-KAP untuk audit tahun buku 2025</li> </ol>	
<b>5.</b>	Tanggal Rapat	<b>06 November 2025</b>
	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
	<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja BPR dan Pencapaian RBB Bulan Januari 2025 sd. 31 Oktober 2025</li> <li>2. Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APUPPT PPSPM</li> <li>3. Isu Strategis               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pertumbuhan KYD dan NPL</li> </ol> </li> </ol>	

b. TKS Berbasis Risiko

<b>6.</b>	Tanggal Rapat	<b>10 Desember 2025</b>
-----------	---------------	-------------------------

	Jumlah Peserta	<b>2 orang</b>
--	----------------	----------------

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Evaluasi Kinerja BPR dan Pencapaian RBB Bulan Januari 2025 sd 30 November 2025
2. Evaluasi Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APUPPT PPSPM
3. Pembahasan RBB 2026
4. Isu Strategis
  - a. Pertumbuhan KYD dan NPL
  - b. TKS Berbasis Risiko

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 6 (enam) kali dalam setahun di sepanjang tahun 2025

#### 14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

##### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

<b>1.</b>	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>Riwandari Juniasti</b>
-----------	------------------------------	---------------------------

	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>6 kali hadir</b>
--	-----------------------------	---------------------

	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>
--	--------------------------------------	---------------------

<b>2.</b>	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>Bambang Widiyanto</b>
-----------	------------------------------	--------------------------

	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>6 kali hadir</b>
--	-----------------------------	---------------------

	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>
--	--------------------------------------	---------------------

Semua rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris.

#### 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

##### 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
--------------------------------	----------------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
-----------------------------------	----------------

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
---------------------------------------	----------------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
--	----------------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada	<b>0 kasus</b>

Tahun Laporan	
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

#### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

Selama periode tahun 2025 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Dana Multi Guna.

## 16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>

  

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>

Nihil

## 17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Nihil.

## 18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik		
1.	Tanggal Pelaksanaan	<b>01 Desember 2025</b>
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	<b>01. Kegiatan Sosial</b>
	Penerima Dana	<b>Perbarindo</b>
	Penjelasan Kegiatan	<b>Sumbangan Bencana Alam</b>
	Jumlah (Rp)	<b>Rp1.000.000</b>
2.	Tanggal Pelaksanaan	<b>17 Desember 2025</b>
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	<b>01. Kegiatan Sosial</b>
	Penerima Dana	<b>Perbarindo</b>
	Penjelasan Kegiatan	<b>Sumbangan untuk Yayasan Pelita Jiwa</b>
	Jumlah (Rp)	<b>Rp1.000.000</b>

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR Dana Multi Guna untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kabupaten Bekasi, 27 April 2026

**PT. BPR Dana Multi Guna**

**Muhamad Alwin**

Direktur Utama

**Riwandari Juniasti**

Komisaris Utama